



REKONSTRUKSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS INDO-PASIFIK ABAD KE-21

Ian Montratama

Institute for Defense and Strategic Research.
email: montratama@gmail.com

Abstract

Indo-Pacific region is the most dynamic region in the 21st century with the economic growth that exceeds the rest of the world. Increased prosperity of countries in the region is accompanied by an increase in the defense budget that leads to arms race. The phenomenon is due to the existence of a conflict of interests among countries in the region in various forms. Border dispute is the most sensitive issue that can escalated into armed conflict. Such prominent problem is the border dispute over the territorial waters between some ASEAN countries with China in the South China Sea (SCS). SCS dispute involving China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan. This article presents an in-depth review of the foreign policy of the Indonesian government should play in the Global Maritime Nexus vision in dealing with the dynamics of the strategic environment in the Indo-Pacific region in the 21st century.

Keywords: *Global Maritime Nexus, Indonesian Foreign Politics, Indo-Pacific, South China Sea Dispute, Strategic Environment Dynamic*

Abstrak

Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang paling dinamis di abad ke-21 dengan pertumbuhan ekonomi yang melebihi kawasan lainnya. Peningkatan kemakmuran negara-negara di kawasan tersebut bersamaan dengan peningkatan anggaran pertahanan yang mengesankan perlombaan senjata. Fenomena ini tidak terlepas dari eksistensi konflik kepentingan dari sejumlah negara kawasan dalam beragam bentuk. Sengketa wilayah perbatasan merupakan isu paling sensitif yang dapat terekskalasi menjadi konflik bersenjata. Masalah yang menonjol adalah sengketa perbatasan wilayah perairan antara beberapa negara ASEAN dengan Cina di Laut Cina Selatan (LCS). Sengketa di LCS melibatkan Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Namun jika melihat peta kuno 'sembilan garis putus' Cina, wilayah perairan yang diklaim Cina juga meliputi sebagian perairan Natuna. Artikel ini menyuguhkan kajian mendalam tentang politik luar negeri yang seharusnya dimainkan Pemerintah Indonesia di dalam visi Poros Maritim Dunia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik pada abad ke-21.

Kata Kunci: Dinamika Lingkungan Strategis, Indo-Pasifik, Politik Luar Negeri Indonesia, Poros Maritim Dunia, Sengketa Laut Cina Selatan

Pendahuluan

Pada tahun 2007, muncul pertama kali istilah Indo-Pasifik sebagai pengganti terminologi Asia-Pasifik dengan perbedaan mendasar penekanan pada wilayah yang berkaitan dengan perairan. Kawasan Indo-Pasifik meliputi Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Asia Daratan, Jepang, Asia Tenggara dan Benua Australia, yang meliputi negara-negara maju seperti Cina, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Kanada. Kawasan tersebut telah menjadi yang paling dinamis di abad ke-21 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari belahan dunia lainnya.

Peningkatan kemakmuran di sejumlah negara di Indo-Pasifik dibarengi dengan peningkatan anggaran pertahanan sehingga terkesan terjadi perlombaan senjata antar negara di Indo-Pasifik. Fenomena perlombaan senjata tersebut tidak terlepas dari eksistensi konflik kepentingan antar sejumlah negara di Indo-Pasifik seperti Cina, AS, Jepang, dan India. Bentuk dari konflik kepentingan tersebut berupa sengketa perbatasan, perebutan akses atas sumber daya alam dan pasar barang ekspor, serta kendali atas jalur pelayaran maritim. Sebagian besar konflik tersebut berdimensi maritim. Sehingga terminologi Indo-Pasifik dapat menjadi suatu domain baru yang khusus membahas aspek kemaritiman di Asia Pasifik.

Khusus masalah sengketa perbatasan maritim, isu tersebut sangat sensitif yang dapat terekskalasi menjadi konflik bersenjata (baca: perang). Antar negara ASEAN saja masih terdapat sengketa wilayah yang belum terselesaikan, seperti antara Indonesia-Malaysia. Namun masalah yang paling menonjol adalah sengketa perbatasan wilayah perairan antara sejumlah negara di Laut Cina Selatan (LCS). Sengketa di LCS melibatkan Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Namun jika melihat peta kuno ‘sembilan garis putus’ Cina, wilayah perairan yang diklaim Cina juga meliputi sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Masalah lain yang menonjol di Indo-Pasifik adalah kompetisi akses dan kendali atas sumber daya alam (dalam istilah hubungan internasional dikenal istilah *resources war*). Terdapat potensi sumber daya alam yang melimpah di perairan Indo-Pasifik berupa minyak bumi dan gas alam. Kedua sumber daya alam tersebut merupakan sumber energi utama di abad ke-21 yang masih belum tergantikan dengan sumber energi lain. Setidaknya untuk 50 tahun ke depan. Hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis energi fosil sehingga akses terhadap sumber energi merupakan suatu kebutuhan vital. Hal ini yang

melatarbelakangi persaingan sejumlah negara untuk menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam yang secara kebetulan berada di wilayah yang dipersengketakan oleh sejumlah negara, seperti di Laut Cina Selatan (termasuk Natuna) dan Blok Laut Ambalat.

Dinamika Di Kawasan Indo-Pasifik

Dengan meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara eksportir saling berkompetisi untuk memasarkan produknya di kawasan tersebut. Persaingan itu tidak terbatas pada tingkat perdagangan internasional, namun juga pada investasi langsung ke sejumlah pasar di Indo-Pasifik untuk jaringan distribusi, industri manufaktur serta investasi pembangunan prasarana ekonomi seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik serta perbankan. Persaingan sejumlah negara dalam berinvestasi di pasar regional ini turut andil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga kawasan Indo-Pasifik semakin maju dan semakin menarik minat investor asing.

Kawasan Indo-Pasifik meliputi negara-negara besar (*great powers*) seperti Cina, Jepang, India, dan AS serta sejumlah negara sedang (*middle powers*) seperti Australia, Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara kaya di Timur Tengah. Keberadaan sejumlah negara besar dan sedang ini membuat perairan di Indo-Pasifik tidak saja menjadi perairan dengan lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia, namun juga menjadi muara konflik kepentingan kekuatan besar untuk merebut kendali atas jalur pelayaran laut di Indo-Pasifik. Kekuatan besar seperti AS dan Cina telah membangun *alignment* secara bilateral maupun multilateral untuk menjamin kepentingan nasionalnya atas navigasi di laut.

Laut menjadi dimensi geografis yang semakin vital bagi keamanan dan kesejahteraan negara di abad ke-21. Melalui laut, peradaban manusia mampu mengirim barang dan memproyeksikan kekuatan militer secara masif. Teknologi manusia masih belum mampu memanfaatkan dimensi udara dan angkasa luar, sedangkan dimensi daratan memiliki keterbatasan dalam perhubungan karena terpisah oleh lautan. Dengan kesadaran ini, visi Presiden Joko Widodo atas Poros Maritim Dunia menjadi sangat relevan, terutama dalam dinamika lingkungan strategis yang condong bernuasa maritim.

Visi Maritim Indonesia

Pada tanggal 13 November 2014, konsepsi Poros Maritim Dunia (PMD) yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara resmi di Naypyidaw-Myanmar pada forum *East Asian Summit*

ke-9 pada prinsipnya merupakan visi maritim Indonesia untuk menjadi kekuatan maritim (bukan sekedar negara maritim) berskala global. Negara maritim, menurut Hasjim Djalal, adalah suatu negara yang paham dan mampu memanfaatkan ruang maritimnya untuk kepentingan ekonomi, pertahanan, politik, dan sebagainya. Sedangkan kekuatan maritim mengandung arti kemampuan negara mempengaruhi negara lain untuk kepentingan (maritim) negara tersebut. Status kekuatan maritim melebihi negara maritim.

Konsepsi PMD yang disampaikan Presiden Joko Widodo masih sangat abstrak. Terlebih saat ini, Presiden semakin jarang menyampaikan tentang visi PMD. Hal ini membuat terjadi silang pendapat tentang penafsiran PMD tersebut. Dari sejumlah analisa di forum akademik, setidaknya ada tiga kelompok pendapat tentang definisi PMD. Pembagian kelompok ini terutama dikarenakan perbedaan pendapat tentang makna kata "poros" dalam PMD. *Kelompok pertama* memaknai kata poros sebagai pusat atau sumbu. PMD diartikan sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat atau sumbu aktivitas kelautan dunia. Bagi kelompok pertama, PMD diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *Global Maritime Fulcrum* (GMF). Kemudian *kelompok kedua* memaknai kata poros sebagai *alignment*, sama seperti *alignment* dalam konteks poros politik. Bagi kelompok kedua, PMD diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Global Maritime Axis* (GMA). Dalam kelompok kedua, visi PMD adalah membangun *alignment* dengan kekuatan lain di kawasan regional yang dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia untuk menjadi pemain global di bidang maritim. Sedangkan *kelompok ketiga* memaknai kata poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim. Visi PMD dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai penguasa atau pengendali jalur pelayaran maritim dunia. Kelompok ini menerjemahkan PMD menjadi *Global Maritime Nexus* (GMN).

Artikel ini dibuat dengan mengadopsi visi PMD versi kelompok ketiga. Penulis berasumsi bahwa lokasi geografis Indonesia amat strategis. Ia berada di persimpangan antara dua samudra, empat benua (Asia Daratan-Australia-Afrika-Amerika), dua peradaban (Timur-Barat), empat agama (Kristen-Budha-Islam-Hindu), tiga ras (Mongoloid-Kaukasian-Melanesia), dua kekuatan besar (AS-Cina) dan dilintasi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lokasi yang sangat unik ini merupakan modal dasar yang seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memiliki posisi strategis dalam bidang kelautan dunia. Sesuai pidato Bung Hatta, Indonesia hendaklah menjadi subjek melalui kepiawaiannya berdiplomasi terhadap

persaingan politik internasional di kawasan Indo-Pasifik, terutama persaingan antara AS dan Cina.

Oleh karenanya, PMD sebagai visi maritim haruslah dibangun di atas suatu kesadaran geopolitik dalam memanfaatkan dinamika strategis di Indo-Pasifik untuk kepentingan nasional Indonesia. Indonesia yang berada tepat di tengah-tengah (secara harfiah) Indo-Pasifik, walau tanpa melakukan apapun sebenarnya sudah menjadi pusat maritim Indo-Pasifik (suatu kawasan yang menjadi pusat persaingan politik dunia). Sehingga, secara harfiah, Indonesia sudah menjadi pusat maritim dunia. Namun bukan itu sasaran yang dituju. Lebih dari itu Indonesia harus mampu memanfaatkan lokasinya agar dapat bangkit kembali menjadi kekuatan maritim berskala global (seperti di era Imperium Sriwijaya dan Majapahit). Visi maritim yang jelas (operasional) dan terukur akan berperan sebagai panduan bagi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan serangkaian program pembangunan yang relevan dalam membangun Indonesia menjadi kekuatan maritim global.

Kemitraan Dengan Cina

Kebangkitan Cina dari sejak tahun 1978 hingga saat ini merupakan suatu fenomena besar di abad ke-21. Cina yang telah terpuruk sejak 150 tahun lalu akibat menjadi korban perang sipil dan kolonialisme melakukan berbagai eksperimen politik setelah Perang Dunia II. Mao Zedong melakukan konsolidasi politik yang menjadikan Cina sebagai negara komunis otoritarian dengan pusat kekuasaan terpusat di Partai Komunis Cina. Kemudian Deng Xiaoping memulai reformasi politik sejak tahun 1978 dengan membuka perekonomian dan mengadopsi sistem kapitalisme ala Cina. Eksperimen Deng Xiaoping ternyata telah berhasil membuat pondasi ekonomi yang solid bagi Cina untuk berkembang menjadi raksasa ekonomi baru di abad ke-21 menyaingi AS, Jepang, dan Uni Eropa.

Presiden Xi Jinping yang memulai kepemimpinan sejak tahun 2013 menginisiasi sejumlah kebijakan ambisius untuk akselerasi kemajuan ekonomi Cina guna mencapai status sebagai hegemon regional seperti di masa sebelum Abad ke-19. Salah satunya adalah kebijakan Jalan Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21. JSM pada prinsipnya adalah upaya Cina dalam mengamankan jalur perdagangannya dengan Afrika dan negara-negara lainnya di sepanjang jalur sutra maritim kuno (yang pada saat ini adalah representasi dari kawasan Indo-Pasifik). JSM juga dapat diartikan sebagai upaya *counter-containment* Cina terhadap negara-negara yang berpotensi menjadi saingan politiknya, terutama AS dan India, dengan

cara memperbanyak jumlah negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kebangkitan ekonomi Cina. Kebangkitan ekonomi dan inisiatif global Cina ini menunjukkan bahwa Cina berupaya berperilaku layaknya kekuatan besar (*great power*) yang hidup berdampingan dengan *superpower* (AS) melalui kerja sama dan kompetisi (secara damai) di bidang ekonomi dan militer.

Cina mewujudkan kebijakan JSM dengan melakukan investasi untuk menghubungkan pelabuhan Cina dengan negara-negara lain melalui konektivitas maritim, kerja sama antarkota, dan kerja sama ekonomi. Di satu sisi, JSM akan memperkuat basis ekonomi Cina untuk bekerja sama dengan negara-negara di sepanjang rute jalan sutra maritim dengan lebih baik lagi. Di sisi lain, JSM juga memfasilitasi pengembangan blok perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), sebagai pesaing dari blok perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang disponsori AS. JSM dikemas oleh Cina sehingga menarik perhatian negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di sepanjang jalur sutra maritim.

Sejalan dengan pergeseran pusat ekonomi dan politik dunia di abad ke-21 ke arah Indo-Pasifik, kawasan ini telah memasuki babak baru geopolitik regional yang bermuara pada munculnya berbagai konflik kepentingan antar kekuatan besar dunia. Kompleksitas konflik kepentingan tersebut telah diramalkan oleh Buzan dengan istilah *Asian Supercomplex*. Kebijakan Xi Jinping yang menjadikan investasi asing sebagai *currency* di Indo-Pasifik mampu menembus sekat-sekat penghalang di kelompok negara mitra lawan politiknya. Pilihan Cina untuk menjadikan ekonomi sebagai koridor kerja sama internasional sulit untuk dibendung. Karena sistem perekonomian dunia sudah bersifat liberal. Sedang Cina memiliki keunggulan dalam hal harga komoditi, penguasaan teknologi tinggi dan akumulasi modal yang berlebih. Dengan menggunakan keunggulan komparatifnya, Cina memfasilitasi pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi di Indo-Pasifik sebagai upaya mewujudkan lanskap Indo-Pasifik yang damai dan stabil.

Merujuk pada pendapat Liu Cigui, Cina menetapkan empat langkah dalam mewujudkan Jalan Sutra Maritim Abad ke-21. *Pertama*, Cina mensponsori pembangunan konektivitas laut yang lebih baik, sesuai dengan kepentingan nasional Cina. *Kedua*, Cina melakukan investasi pada ekonomi dan industri kelautan di sejumlah negara Indo-Pasifik. *Ketiga*, Cina berupaya membangun kerja sama dalam bidang keamanan maritim, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional. *Keempat*, Cina berupaya memperluas kerja

sama di bidang budaya bahari, selain untuk meningkatkan kesadaran akan arti penting laut, juga untuk meningkatkan citra Cina di masyarakat Indo-Pasifik.

Jika JSM memiliki empat langkah implementasi, visi PMD Indonesia, memiliki lima pilar utama, yaitu: budaya bahari, ekonomi kelautan, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Keempat pilar PMD sama dengan keempat langkah implementasi JSM. Hanya pilar diplomasi maritim yang tidak ada pada PMD. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, PMD berwawasan ke dalam dan keluar (dengan adanya diplomasi). Sedangkan JSM sepenuhnya berwawasan keluar (karena JSM pada hakekatnya adalah wujud diplomasi Cina untuk terlepas dari *containment* AS dan mitra dekatnya).

Menyikapi hal di atas, politik luar negeri Indonesia terhadap Cina selayaknya dibangun untuk mengambil manfaat dari Cina bagi kepentingan nasional Indonesia. Mengingat keunggulan Cina di bidang ekonomi dan industri, maka visi PMD dapat dijadikan langkah awal yang baik untuk menempatkan kembali faktor-faktor maritim menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam bekerja sama dengan Cina. Terlebih lagi, pilar PMD sangat selaras dengan empat langkah JSM Cina, karena kedua negara memfokuskan diri di bidang bahari. Karena kesamaan orientasi ini, Indonesia dan Cina seharusnya mampu untuk mencapai titik temu untuk saling bekerja sama.

Pada budaya bahari, kedua negara (Indonesia dan Cina) memandang pentingnya menumbuhkan budaya maritim. Indonesia cenderung berada pada posisi sebagai pihak yang membutuhkan bantuan Cina untuk mendukung terjadinya perubahan sosial secara masif, serta untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap laut. Laut yang selama ini dibelakangi perlu untuk dihayati sebagai bagian integral dari identitas bangsa, sekaligus sebagai peluang bagi peningkatan kesejahteraan sosial Indonesia. Di lain pihak, Cina telah berhasil menunjukkan superioritas di bidang budaya bahari. Pelaut Cina terkenal akan ketangguhannya melaut. Industri galangan Cina pun saat ini telah mengeser industri Korea Selatan dan menjadi yang terbesar di dunia.

Di bidang ekonomi kelautan, Indonesia pun cenderung sebagai pihak resipien dalam kerja sama bilateral yang sehat dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan secara optimal dan ramah lingkungan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya modal dan teknologi dari Cina. Indonesia sangat membutuhkan investasi asing di bidang prasarana dan sarana transportasi, pembangkit dan distribusi listrik, air bersih, pertambangan, distribusi gas, prasarana telekomunikasi, peralatan pertanian, dan lain

sebagainya. Potensi eksploitasi sumber daya di Indonesia masih sangat tinggi. Masih banyak wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang belum terjangkau investasi asing. Sudah saatnya sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara tidak diproses di luar negeri lagi. Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam memproses hasil tambang, agar dapat menikmati nilai tambah ekonomi yang lebih besar lagi. Diperlukan kepiawaian bernegosiasi dengan pihak investor dari Cina agar keuntungan relatif bagi Indonesia mencapai tingkat yang optimal.

Pada bidang konektivitas maritim, Indonesia pun cenderung menjadi resipien. Kondisi infrastruktur yang masih relatif buruk membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Indonesia harus melakukan konsolidasi ke dalam dengan membangun prasarana transportasi laut yang mampu menampung sejumlah kapal angkut barang dari berbagai ukuran untuk menghubungkan Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Dituntut kemampuan negosiasi dan diplomasi tingkat tinggi untuk mampu memanfaatkan investasi Cina untuk mampu meningkatkan konektivitas intra jalur pelayaran domestik dan konektivitas jalur pelayaran antara pelabuhan Cina dengan sejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Mengintegrasikan rute di PMD dengan JSM merupakan hal yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi berbasis maritim Indonesia. Untuk menjadi pemain ekonomi maritim global, Indonesia harus membangun minimal satu pelabuhan di Indonesia sebagai *global transshipment port*. Di sinilah esensi terbesar dari sinergitas PMD dan JSM .

Untuk bidang diplomasi maritim, Pemerintah Indonesia perlu untuk mendefinisikan kembali politik luar negeri bebas aktifnya. Dalam ranah teoritis, politik bebas aktif adalah politik *non-aligned* yang membuat Indonesia sebagai negara netral sepenuhnya tanpa memiliki *alignment* sama sekali. Namun dalam tataran praktis, Indonesia telah melakukan *alignment* dengan sejumlah negara sejak masa orde lama hingga sekarang. Namun *alignment* yang terbentuk tidak memberi perubahan berarti. Hal ini mungkin dikarenakan adanya keteguhan untuk menjadi negara netral dalam ikatan sejumlah *alignment* dengan negara lain.

Hal di atas membuat suatu kesia-siaan politik. Seharusnya politik luar negeri ditafsirkan sebagai kemampuan Indonesia untuk melakukan *alignment* dengan siapa saja dan memanfaatkan *alignment* itu untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kecenderungan untuk bersikap netral, walau terikat dalam *alignment*, hanya membuat

kebingungan atau malah frustrasi negara mitra *alignment* Indonesia. Indonesia dapat dianggap tidak bersikap sesuai harapan.

Terkait JSM, Indonesia perlu memanfaatkan *alignment* dengan Cina yang dibangun tahun 2005 dengan nama *Strategic Comprehensive Partnership* (SCP), khususnya untuk mendapat manfaat ganda di bidang ekonomi kelautan dan keamanan maritim. Membangun diplomasi maritim dengan Cina menuntut kepiawaian tingkat tinggi. Setidaknya ada dua hal yang harus dijadikan prasyarat. *Pertama*, *alignment* dengan Cina bukanlah suatu bentuk aliansi pertahanan. Artinya Indonesia tidak memiliki batasan untuk menjalin *alignment* dengan lawan politik Cina, yaitu AS. Dan *kedua*, Indonesia harus tegas membela aspirasi sejumlah negara anggota ASEAN menyangkut sengketa di LCS. Terlalu besar kerugian yang dipertaruhkan jika Indonesia tidak dipandang lagi oleh negara-negara ASEAN karena gagal mengakomodir kepentingan mereka melalui kepemimpinan alamiah Indonesia di forum ASEAN.

Pemerintah Indonesia harus mampu mensinergikan tiga kelompok kepentingan secara simultan, yaitu: kepentingan Indonesia, kepentingan ASEAN, dan kepentingan kekuatan besar (*superpower*, *great power* dan *middle power*) secara berurutan. Dalam konteks sinergitas PMD dan JSM, selama koridor kerja sama dengan Cina adalah kerja sama ekonomi semata dan keamanan untuk ancaman nir-militer, maka tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dengan negara lain.

Terkait dengan keamanan maritim, sinergitas PDM dan JSM perlu dibangun untuk membentuk sistem keamanan maritim bersama dalam menghadapi ancaman aktor non-tradisional, seperti perompakan, penyelundupan, *illegal fishing*, bencana di laut, dan lain sebagainya. Sistem keamanan bersama ini harus bersifat inklusif yang dapat melibatkan seluruh negara yang berkepentingan dengan *leading sector*-nya adalah negara yang menguasai wilayah laut yang diawasi. Kedua negara memiliki kepentingan dalam membasmi perompakan di laut.

Kemitraan Dengan AS

Selain hubungan dengan Cina, Indonesia juga harus tetap memelihara hubungan yang lebih erat dengan hegemon dunia (AS) untuk mengoptimalkan perolehan dari kedua kekuatan besar dunia dengan memanfaatkan faktor geografis Indonesia yang berada tepat di tengah Indo-Pasifik. Jika dengan Cina, Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama ekonomi dan

keamanan dalam menghadapi ancaman nir militer, maka dengan AS justru Indonesia sebaiknya bekerja sama militer dalam menghadapi ancaman militer.

Ada dua alasan dari proposisi di atas. *Pertama*, untuk kerja sama ekonomi, dunia usaha AS lebih memiliki peran dalam berhubungan dengan mitra usaha di Indonesia. Berbeda dengan Cina yang peran pemerintahnya masih dominan dalam mengatur dunia usahanya. Sehingga kerja sama ekonomi dengan AS lebih baik diarahkan secara *business-to-business* (B-2-B), dengan mediasi yang bersifat terbatas dari pemerintah. *Kedua*, realitas politik di sekitar Indonesia didominasi dengan *alignment* (terutama dalam bentuk aliansi) dengan kekuatan besar. Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru membentuk aliansi *Five Powers Defense Arrangements* (FPDA) dengan Inggris. Australia dan Selandia Baru membangun aliansi dengan AS dalam Pakta Keamanan ANZUS (kependekan dari *Australia, New Zealand* dan *the United States*). Singapura memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AS dalam bentuk *Strategic Framework Agreement* (SFA). SFA walau bukan dikategorikan sebagai aliansi, namun pada prakteknya AS terkesan lebih solid kepada Singapura dibandingkan dengan sekutunya di Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Filipina. Malaysia pun juga sudah memiliki kemitraan strategis dengan AS yang disebut sebagai *Comprehensive Agreement* yang dimulai pada bulan April 2014.

Dengan dikelilingi sejumlah negara yang berafiliasi ke AS, maka adalah tidak bijak jika Indonesia justru menjauhi AS. Justru sebaliknya, adalah suatu keharusan bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama militer yang sangat erat dengan Amerika Serikat untuk mengimbangi sejumlah kerja sama yang telah dibangun antara negara-negara tetangga kita dengan AS. Kualitas kerja sama tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga AS akan membantu kepentingan Indonesia jika terjadi konflik dengan negara tetangga yang agresif, seperti Malaysia di Blok Laut Ambalat yang kaya akan sumber daya alam.

Pada bulan November 2010, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS meratifikasi kemitraan strategis yang dinamakan *Comprehensive Partnership Arrangement* (CPA) (Hiebert et.al, 2008, hal. 8). Namun lima bulan sebelumnya, kedua negara telah meratifikasi *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense* atau *Defense Framework Arrangement* (DFA) (Hiebert et.al, 2008, hal. 8) yang disahkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) dan Menteri Pertahanan AS (Menhan AS). Kemitraan tersebut terwujud karena salah satunya adanya kebijakan pemerintahan Obama sejak tahun 2011 untuk lebih memberi perhatian kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan

nama kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia* (Manyin et al, 2012, hal. 2). Kebijakan ini adalah respons AS atas kebangkitan Cina sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi.

AS telah menyadari nilai strategis Indonesia dalam konstelasi politik di Indo-Pasifik. Indonesia adalah negara yang terlalu besar untuk diabaikan AS. Sebaliknya, AS juga adalah negara dengan kekuatan yang terlalu besar untuk diabaikan atau malah diperangi Indonesia. Jika belajar dari Rusia di tahun 1939 terhadap Nazi Jerman, saat ini Indonesia haruslah berusaha untuk menghindari perang. Untuk menghindari perang, tidak cukup jika Indonesia mengandalkan sikap politik pasifis dan bersandar pada multilateralisme PBB. Akan lebih terjamin jika Indonesia menyandarkan diri pada kekuatan AS. Menyandarkan diri tidak sama dengan takluk. Namun lebih kepada membangun perjanjian damai dan saling membantu dalam urusan pertahanan (walau sebenarnya AS mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan militer Indonesia sama). Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dalam proses pembangunan kekuatannya. Dalam situasi saat ini, mungkin dibutuhkan waktu minimal 50 tahun bagi Indonesia untuk bangkit menjadi hegemon regional di tingkat regional (melebihi kekuatan Malaysia, Singapura, Australia, dan gabungan ketiganya).

Dengan alasan di atas, yang paling tepat bagi Indonesia adalah membangun kerja sama dengan AS di bidang politik dan pertahanan, terutama dalam menghadapi ancaman militer (tradisional). Diakui atau tidak, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman dari Malaysia. Terdapat sengketa atas Blok Laut Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang belum tuntas. Perilaku Malaysia yang provokatif harus dicari solusinya. Sementara pengalaman penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan opsi terburuk, jika mengambil hikmah dari kasus Sipadan dan Ligitan.

Sengketa Ambalat terutama disebabkan oleh faktor sumber daya alam, dimana terdapat minyak bumi dan gas alam yang terkandung di bawah dasar laut perairan Ambalat. Kedua pemerintahan telah menginisiasi babak negosiasi. Namun sejak tahun 2005, aparat Malaysia kerap melakukan sejumlah tindakan pelanggaran batas secara provokatif. Perilaku provokatif Malaysia ini dapat merupakan suatu tanda bahwa Malaysia memiliki persepsi bahwa akumulasi kekuatan internal dan eksternal (yang didapat dari aliansi FPDA) telah membuat situasi ketidakseimbangan ancaman (*balance of threat*) antara kedua kekuatan.

Indonesia dipandang berada pada posisi inferior yang kekuatan militernya kurang memiliki daya tangkal. Situasi ketidakseimbangan ancaman ini harus ditanggapi. Pemerintah Indonesia harus mengimbangi hal tersebut dengan cara meningkatkan kekuatan internal dan menambah kekuatan dari luar, dalam bentuk aliansi atau kuasi-aliansi. Dan mitra aliansi terbaik saat ini di dunia adalah AS.

Namun aliansi dalam tataran kebijakan formal di Indonesia sepertinya dianggap hal tabu. Pemerintah Indonesia sangat menjunjung politik bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif diartikan sebagai bebas dari aliansi (tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila) (Kusumaatmadja, 1983, hal. 7). Namun sejak era Sukarno hingga sekarang politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak pernah dijalankan dengan konsisten. Di era Sukarno, Indonesia pernah terlibat dalam poros Jakarta-Peking-Pyongyang-Moskow. Indonesia menerima banyak bantuan dan tawaran persahabatan dari Cina, Korea Utara dan Rusia (Fadillah, 2015).

Di dalam tataran kebijakan praktis, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *alignment* dengan sejumlah negara dalam bentuk kemitraan strategis/komprehensif yang menyangkut masalah keamanan dengan enam negara, yaitu: Australia, AS, Cina, Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Deklarasi kemitraan komprehensif antara Australia dan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 April 2005; dengan Cina pada tanggal 25 April 2005; dengan Jepang pada tanggal 28 November 2006; dengan Korea Selatan pada tanggal 4 Desember 2006; dengan AS pada tanggal 10 November 2010; dan dengan Jerman pada tanggal 10 Juli 2012. Keseluruh kemitraan khusus tersebut adalah bentuk ketidakkonsistenan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif yang bebas dari *alignment*.

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia menyelaraskan antara filosofi ideal dengan kebijakan praktis. Dalam dunia yang anarkis ini tidak mungkin bagi negara yang masih lemah seperti Indonesia untuk tetap bebas dari *alignment*. Indonesia membutuhkan kekuatan eksternal untuk membangun daya tangkal dari ancaman provokasi negara potensi lawan. Politik bebas aktif dapat direinterpretasi sebagai politik luar negeri yang membebaskan Indonesia untuk melakukan *alignment* dengan negara manapun. Sehingga *alignment* yang sudah terbangun harus dipelihara dan ditingkat manfaatnya, terutama dalam meningkatkan daya tangkal Indonesia.

Kemitraan strategis Indonesia dan AS sejak tahun 2010 harus memiliki nilai dampak nyata bagi Indonesia. Satu bentuk pengujiannya adalah dengan mengaitkan kemitraan khusus tersebut dengan masalah yang dihadapi Indonesia dalam sengketa Ambalat dengan Malaysia. Pelanggaran wilayah yang terus terjadi dari 2005 hingga kini oleh Malaysia harus dapat diturunkan, manakala kemitraan khusus Indonesia-RI terbangun sedemikian rupa sehingga perilaku provokatif Malaysia di Ambalat dapat ditekan seminim mungkin.

Alignment dengan *Superpower* dunia tanpa memberi daya tangkal bagi Indonesia hanya akan menjadi suatu kesia-siaan. Dalam hal ini, kemitraan strategis antara Indonesia dan AS belum mampu memiliki dampak berarti untuk memproyeksikan kekuatan eksternal Indonesia atas Malaysia dengan aliansi FPDA-nya. Perlu adanya perubahan dalam hubungan bilateral RI-AS yang tidak mengalami kemajuan yang signifikan setelah diratifikasinya kemitraan strategis tersebut. Masalah mispersepsi dan *mistrust* sejumlah pejabat Indonesia kepada AS harus terlebih dahulu dibenahi.

Pembentukan kemitraan strategis dengan AS masih membutuhkan komunikasi strategis yang efektif terhadap elemen masyarakat Indonesia sendiri, terutama kelompok ultranasionalist dan kelompok religius yang resisten terhadap hubungan pertahanan dengan AS. Isu embargo persenjataan dari tahun 1999 hingga 2005 serta dukungan AS terhadap aksi zionis Israel di bumi Palestina telah menjadi stigma yang menghambat kemajuan hubungan bilateral RI-AS. Masih lekat kecurigaan sejumlah pejabat bahwa AS tidak benar-benar menghilangkan embargo ekspor senjata ke Indonesia. Walaupun pejabat AS setingkat duta besar sekali pun telah berupaya meyakinkan bahwa Pemerintah AS berkeyakinan bahwa tidak akan ada lagi embargo terhadap Indonesia. Indonesia pasca reformasi telah menjadi negara yang sangat demokratis yang menjunjung hak asasi manusia. Tidak ada alasan bagi AS untuk menerapkan embargo bagi Indonesia atau mencampuri politik dalam negeri Indonesia.

Dalam bidang politik dan keamanan saat ini, akan sulit mencari alternatif lain sebaik AS sebagai mitra khusus. Cina yang ekonomi dan kekuatan militernya tengah bangkit, tetap saja kekuatannya masih jauh di bawah kekuatan AS. Lebih dari itu, Cina tengah terkepung secara politik oleh kekuatan AS dan pendukungnya, yaitu : Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan (mungkin) Vietnam. Adalah keliru jika Indonesia memilih bermitra secara politik dan keamanan dengan Cina.

DFA antara RI- AS merupakan pintu gerbang ke arah terwujudnya *alignment* dalam bentuk kuasi-aliansi atau aliansi antara Indonesia dan AS. AS telah memiliki kemitraan strategis dengan 63 negara di luar Indonesia (Hamilton, 2014, hal. 22-23). Dalam kemitraan strategis, AS tidak hanya memberikan dukungan politis, namun juga berupaya untuk membantu meningkatkan kapasitas pertahanan negara mitra khususnya. Bentuk bantuan itu berupa bantuan program hibah, bantuan pelatihan, dan latihan bersama. Selain itu, AS juga memberi akses lebih luas kepada negara mitra strategisnya untuk mengimpor sarana pertahanan dari AS melalui mekanisme *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Foreign Military Financing* (FMF). Instansi AS yang mengelola kemitraan ini adalah *Defense Security Cooperation Agency* (DSCA). Instansi ini membantu memberikan kajian untuk membangun institusi pertahanan di negara mitra AS yang dikenal dengan program *Defense Institution Building* (DIB) (DSCA, nd). Salah satu sub instansi dibawah DSCA yang melaksanakan program DIB adalah *Defense Institution Reform Initiative* (DIRI) (Kemenhan RI, 2015). DIRI melakukan kajian untuk memajukan sistem birokrasi dan perencanaan strategis negara mitra AS. Kajian ini bersifat tidak diminta (*unsolicited*) dan tanpa paksaan untuk dilaksanakan (Kemenhan RI, 2015). Salah satu kajian yang dihasilkan DIRI adalah tentang usulan program *Minimum Essential Forces* (MEF) versi DIRI untuk TNI (Kemenhan RI, 2015). Kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah AS untuk membantu negara mitranya dalam membangun sistem pertahanan yang lebih baik.

Keinginan AS untuk bermitra dengan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan AS sejak tahun 2011 untuk memberi perhatian lebih kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia* (Manyin et al, 2012, hal. 2). Bentuk kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi (Manyin et al, 2012, hal. 2). *Rebalance* dimaksudkan dengan penarikan pasukan AS di Irak dan Afghanistan, serta menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Pada bulan November 2011, Presiden Obama menyampaikan pidato di depan parlemen Australia bahwa AS akan memainkan peran yang lebih besar dan untuk jangka panjang di Asia Pasifik (White House, 2011). Tujuan utamanya adalah turut membentuk norma dan aturan di Asia Pasifik agar hukum dan norma internasional ditegakkan, *freedom of navigation* tidak terganggu, kekuatan-kekuatan besar membangun

kepercayaan dengan negara-negara tetangganya dan persengketaan diselesaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

Jika pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu memanfaatkan momentum kebijakan AS di atas, maka bukanlah tidak mungkin jika Indonesia akan mampu membangun kemitraan strategis yang seerat hubungan bilateral AS dengan Singapura. Dengan kemitraan yang bersifat kuasi-aliansi, diharapkan daya tangkal Indonesia menjadi semakin besar dan *status quo* di Blok Laut Ambalat diharapkan dapat dipertahankan oleh Indonesia.

Kemitraan Dalam Asean

Tahun 2016 ini menjadi tonggak sejarah bagi ASEAN dengan berlakunya Masyarakat ASEAN yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu: budaya; ekonomi (dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN); politik dan keamanan (dalam bentuk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN). Dengan adanya Masyarakat ASEAN ini diharapkan terjadi akselerasi kemajuan bersama antar negara ASEAN serta menjamin terpeliharanya perdamaian di kawasan. Bentuk Masyarakat ASEAN ini memang belum disepakati menjadi seperti Masyarakat Uni Eropa dengan mata uang dan parlemen bersama. Namun peluang ke arah sana masih tetap diperjuangkan oleh Indonesia.

Selain berpeluang untuk mendorong kemajuan bersama ASEAN, keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (KPKA) memiliki tantangan atas kredibilitas ASEAN. Hal ini terkait dengan adanya sengketa wilayah antar negara ASEAN serta antara sejumlah negara ASEAN dengan pihak luar. Apabila forum ASEAN tidak mampu menyelesaikan masalah keamanan dimaksud, maka kemungkinan besar kekuatan luar akan terlibat dan/atau dilibatkan oleh negara ASEAN sendiri. Dengan masuknya kekuatan asing, maka peran ASEAN akan mengecil.

Tantangan yang lain adalah di bidang ekonomi. Disparitas kesejahteraan tiap negara anggota ASEAN yang cukup tinggi selalu dapat memicu masalah ekonomi regional. Hal ini seperti yang terjadi di Uni Eropa, dimana sejumlah negara anggota UE mengalami depresi ekonomi yang secara tidak langsung, menghambat kemajuan UE. Terjadi migrasi pekerja dari daerah kurang sejahtera ke daerah yang lebih maju. Hal ini sedikit banyak menimbulkan ketegangan sosial dengan penduduk asli yang merasa terancam atas munculnya pesaing tenaga kerja yang lebih murah. Selain itu negara-negara yang lebih maju dituntut untuk

membantu negara-negara anggota yang tengah dilanda krisis ekonomi kronis. Padahal mayoritas negara ASEAN masih memiliki tingkat pendapatan rata-rata di bawah 5.000 USD per tahun per kapita. Artinya tingkat kesejahteraan umum di kawasan ASEAN relatif masih rendah. Hanya Singapura dan Brunei Darussalam (dua negara dengan wilayah terkecil) yang berhasil mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi. Artinya, akan sulit untuk diharapkan adanya bantuan ekonomi yang bersumber dari negara ASEAN sendiri.

Tantangan yang ketiga adalah sengketa perbatasan yang terjadi antar negara anggota ASEAN dan antarnegara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN juga menjadi agenda besar yang harus diprioritaskan oleh atau melalui ASEAN sendiri. Kegagalan dalam penyelesaian masalah sengketa perbatasan, seperti masalah di Laut Cina Selatan antara Vietnam, Filipina (juga sejumlah negara anggota ASEAN lainnya), dan Cina melalui forum ASEAN bisa menurunkan kredibilitas ASEAN. Hal tersebut mulai terasa manakala Vietnam dan Filipina lebih cenderung memanfaatkan *alignment*-nya dengan AS dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan melawan Cina.



Gambar 1. Peta Sengketa Wilayah Laut di Laut Cina Selatan

Sengketa di Laut Cina Selatan melibatkan enam negara, yaitu: Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Cina (Kementrian Luar Negeri, nd). Indonesia juga berpotensi terlibat dalam sengketa di Laut Cina Selatan jika Cina terus mengklaim wilayah perairan di Natuna. Konsep wilayah laut Cina yang kontroversial bernama “9 garis

putus.” Konsep tersebut telah memotong wilayah laut enam negara lain (Bader, 2014). Vietnam yang dahulu pada Perang Vietnam beraliansi dengan Cina, saat ini sudah membangun kerja sama lebih erat dengan AS. Filipina yang sebagai sekutu AS sejak tahun 2003 semakin meningkatkan hubungan pertahanan dengan AS dan Vietnam. Sedangkan Indonesia masih bersikap sebagai *non-claimant state* dan cenderung membatasi diri dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia ini tentunya disayangkan oleh Vietnam dan Filipina.

Sengketa perbatasan di atas dapat menjadi bom waktu yang berpotensi untuk menjadi konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Ada dua dimensi yang terkandung dalam masalah perbatasan ini: yaitu dimensi historis dan politis. Dimensi historis berarti tidak adanya kejelasan pada garis batas antarnegara akibat warisan dari era kolonial. Dimana perbatasan merupakan garis artifisial yang disetujui oleh para penjajah tanpa mempertimbangkan kondisi dan sejarah masyarakat lokal. Perbatasan warisan era kolonial ini memisahkan masyarakat dengan kesamaan suku, budaya, bahasa, ras. Saat ini, pemisahan tersebut memunculkan sentimen solidaritas etnis lintas negara seperti isu etnis Melanesia yang terjadi di Papua dan Papua New Guinea; serta isu masyarakat Sulu di Mindanao Selatan dan Sabah. Dalam politik, mempertahankan wilayah perbatasan merupakan kepentingan nasional vital oleh setiap negara. Tidak ada satu negara pun yang akan membiarkan wilayahnya direbut oleh negara lain tanpa diperjuangkan terlebih dahulu, baik melalui jalur diplomasi, jalur hukum, dan/atau melalui instrumen militer. Sejarah telah mencatat banyak konflik yang disebabkan oleh masalah perebutan perbatasan atau wilayah, seperti Perang Malvinas, Perang Kuwait, persaingan India-Cina, persaingan India-Pakistan, dan lain sebagainya. Masalah konflik perbatasan masih relevan sebagai penyebab perang di abad ke-21 ini.

Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN harus selalu ditujukan untuk mengukuhkan status tidak resmi Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN. ASEAN adalah rumah besar Indonesia. Kebijakan ASEAN merupakan refleksi dari kepentingan nasional Indonesia. Namun untuk mengukuhkan peran tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan masalah sengketa perbatasan. Perlu dipertimbangkan langkah-langkah penyelesaian sengketa perbatasan yang sejak dulu belum mencapai titik temu secara menyeluruh antar negara-negara ASEAN sendiri. Indonesia harus mampu memanfaatkan ASEAN untuk menyelesaikan masalah sengketa perbatasan dan meningkatkan keamanan

regional, baik dari ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Kebijakan luar negeri Indonesia selalu ingin mengedepankan solusi menang-menang dengan menghindari kemungkinan reaksi diplomatik negatif dan membuat semua pihak puas. Namun pendekatan tersebut tidak membantu dalam memperkuat dan menyatukan ASEAN. Negara yang bersengketa dengan Cina, seperti Vietnam dan Filipina, tidak memiliki pendekatan yang sama dengan Indonesia dan menganggap strategi menang-menang sebagai bentuk ketiadaan komitmen untuk berdiri bersama menghadapi ancaman. Tidaklah mengagetkan jika kedua negara tersebut lebih menghendaki keterlibatan AS di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai kekuatan penyeimbang Cina. Vietnam menyambut baik pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di ASEAN Summit 2010, yang mengatakan AS memiliki kepentingan menjaga pelayaran bebas di Laut Cina Selatan dan bersedia memfasilitasi pembicaraan multilateral tentang isu tersebut. Hal itu dapat dipandang sebagai persetujuan implisit AS untuk memfokuskan perhatiannya ke wilayah Indo-Pasifik. Sementara Filipina, merespons positif ketika pada bulan November 2012 Presiden Barack Obama mengumumkan akan menempatkan 2.500 marinir di Darwin, Australia. Reaksi Indonesia sendiri saat itu lebih pesimistis dan mengkritisi kompetisi keamanan yang berkembang di kawasan. Pendekatan menang-menang Indonesia berpeluang untuk dianggap efektif hanya bagi kepentingan Indonesia dalam mempertahankan *status quo* di kawasan dan memelihara hubungan dengan AS dan Cina. Namun di jangka panjang, kebijakan ini hanya akan menurunkan peran dan kewibawaan Indonesia di ASEAN dan dunia internasional.

Di tahun 2016 ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan. Isu keamanan maritim regional menjadi semakin mengemuka akibat dibebaskannya hambatan masuk atas lalu lintas barang, orang, modal, dan jasa antarnegara ASEAN. Kerawanan di laut dapat meningkat. Isu-isu seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, dan lain sebagainya akan menjadi isu yang harus dikelola bersama. Menilik hal tersebut, harus disadari bahwa selain aktor negara, masalah aktor non-negara juga penting untuk dicermati, seperti kelompok-kelompok kriminal terorganisir dan teroris. Motivasi aktor non-negara sebagiannya disebabkan oleh faktor-faktor domestik seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya (minimnya pengawasan maritim, rendahnya kemampuan negara dalam menindak pelaku kejahatan, juga meningkatnya daya tarik potensi Indonesia secara ekonomis, belum lagi semakin cairnya

pergerakan manusia di Asia Tenggara akibat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN). Aktor non-negara ini terus menjadi ancaman dan intensitas aktivitasnya bahkan dapat semakin meningkat.

Dengan semakin terintegrasinya kawasan ASEAN, kelompok kriminal terorganisir dan teroris semakin diuntungkan. Padahal hingga saat ini, infrastruktur pertahanan dan keamanan seluruh negara di ASEAN belum bekerja secara efektif dan terpadu. Hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana caranya meningkatkan kapasitas keamanan seoptimal mungkin dalam waktu relatif singkat? *Alignment* dalam wujud ASEAN *Political and Security Community* (APSC) menjadi peluang bagi Indonesia untuk memegang peranan yang lebih penting di ASEAN. Efektivitas APSC akan bergantung pada sikap Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dalam melindungi kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Kemitraan Dengan *Middle Powers*

Australia, India, dan Jepang merupakan tiga negara yang walaupun tidak memiliki pengaruh sebesar Cina atau AS di kawasan Indo-Pasifik, namun mempunyai kepentingan yang besar di kawasan ini. Itu sebabnya ketiga negara ini sering terlibat di kancah politik Indo-Pasifik, bagi secara bilateral maupun trilateral. Bagi Australia, Indo-Pasifik atau Asia Tenggara pada khususnya, adalah serambi depan negaranya. Negara mana pun yang hendak menyerang Australia harus terlebih dahulu menguasai wilayah Asia Tenggara. Instabilitas di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mengganggu keamanan dan kepentingan Australia. Itu sebabnya Australia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap stabilitas Indonesia serta hubungan militer dan diplomasi antar kedua negara. Kebijakan Australia ini dapat dilihat di Buku Putih Pertahanan Australia 2013 (Department of Defense Australia, 2013), dimana telah dicantumkan pula terminologi Indo-Pasifik sebagai *strategic arc* baru yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik melalui Asia Tenggara. Konstruksi strategis baru ini juga mewarnai *National Security Strategy* dan Buku Putih Australia pada Abad Asia. Konsep Indo-Pasifik dianggap lebih cocok karena memperluas cakupan Asia-Pasifik hingga meliputi India. Namun Kementerian Pertahanan (Kemhan) Australia menganggap Indo-Pasifik harus didekati secara sub-wilayah ketimbang didekati secara keseluruhan. Tiap sub-wilayah memiliki keunikan dan arsitektur keamanan yang berbeda dengan sub-wilayah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Buzan dalam bukunya *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Buzan dan Waever,

2003), bahwa tiap sub-wilayah memiliki kompleksitas masalah keamanannya tersendiri dan khusus untuk wilayah Asia hal itu dinamakan *Asia Supercomplex* (selain *Regional Security Complex* di sub-wilayah Asia). Keamanan perairan Indonesia juga memiliki nilai kritis bagi Australia. Enam dari sepuluh mitra dagang utama Australia terletak di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sementara, satu-satunya rute untuk menjamin keamanan ekonomi Australia adalah melalui Selat Lombok. Jika selat ini ditutup, kapal yang melintas harus memutar sehingga mengakibatkan kerugian pada biaya transportasi dan waktu pengiriman. Tidaklah heran jika Australia telah membuat traktat dengan Indonesia untuk tidak saling menyerang yang dinamakan Traktat Lombok, pada tahun 2006.

Bagi India, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki potensi kerja sama ekonomi cukup besar, sekaligus menjadi pintu masuk bagi India dalam kompetisi tidak langsung melawan salah satu rival utamanya, Cina. India terus menaruh perhatian besar kepada perkembangan perpolitikan di Indo-Pasifik. India pernah menawari Vietnam, Indonesia, dan Malaysia untuk mendukung pemeliharaan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker dengan sumber daya pemeliharaan dari India (dikenal dengan Diplomasi Flanker) (Simha Rakesh, 2013). India mengoperasikan 272 Su-27 dan Su-30 Flanker, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya dalam memelihara pesawat tempur yang dioperasikan ketiga negara anggota ASEAN tersebut. Pada tahun 2014 lalu, India dan Vietnam bahkan mencapai kesepakatan untuk memperluas kerja sama eksplorasi minyak di perairan yang dipersengketakan, Laut Cina Selatan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada stabilitas keamanan kawasan, terutama dalam hubungannya dengan Cina.

Sementara itu, politik luar negeri India pun sudah semakin meninggalkan sikap politik *non-alignment* ala Nehru. Pada pemerintahan Perdana Menteri Modi, India lebih berani menunjukkan kemitraan strategis dengan AS, terutama di bidang pertahanan ke dunia luar. Situasi geopolitik menuntut India memiliki kekuatan tambahan dalam menghadapi Cina dan Pakistan terkait isu sengketa perbatasan dengan kedua negara pemilik senjata nuklir tersebut. Secara geopolitik, kenyataannya India seperti terkepung. Di barat, India berbatasan dengan Pakistan (rival politik India karena berbagai alasan). Di utara, India berbatasan dengan Cina (rival utama Cina). Di timur, India berdampingan dengan Bangladesh yang merupakan bekas wilayah India yang terpisah akibat berbagai perbedaan. Sementara itu, di bagian selatan ada Sri Lanka yang juga rival India dan ada Samudra Hindia yang dipadati kepentingan banyak pihak sehubungan dengan adanya kepentingan politik, potensi ekonomi

di atas, di dalam, dan di bawah permukaan laut, serta nilai strategis dari perspektif militer. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Siapa yang mengendalikan Samudra Hindia pada masa damai, kepentingannya akan aman. Pada masa krisis, ia dapat mengontrol akses perdagangan siapa pun yang hendak melewati samudra tersebut. Padahal Samudra Hindia adalah *Sea Lines of Communication* (SLOC) penting dalam mengakses sumber energi. Di bawah laut, Samudra Hindia kaya akan mineral-mineral berharga yang belum banyak dieksploitasi namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Sedangkan dari segi militer, Diego Garcia merupakan *hub* logistik yang mendukung operasi kekuatan depan (*forward deployed*) AS dan sekutunya dari Samudra Hindia ke wilayah kritis di Teluk Persia.

Negara pulau tetangga India yang menjalin hubungan bilateral erat dengan Cina adalah Sri Lanka. Cina telah berinvestasi membangun (megaproyek) pelabuhan laut di Kolombo yang dinamakan *Colombo Port City* senilai US\$ 1.4 miliar (Fernando, 2015). Akibat letaknya yang sangat strategis, Kolombo dapat menjadi *entreport* Asia Selatan (menyaingi India). Di permukaan, Cina menegaskan bahwa tujuan proyek ini berfokus pada kepentingan ekonomi. Meski demikian, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kehadiran militer Cina di Samudra Hindia akan semakin intensif (seperti yang sudah dilakukannya beberapa saat lalu dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasional). Wacana ini tentu saja tidak menyenangkan bagi banyak pihak, terutama India dan AS.

Sementara itu, Jepang memiliki hubungan yang cukup erat dan lama dengan kawasan Indo-Pasifik, mengingat kawasan ini merupakan sumber bahan baku dan energi bagi Jepang sebagai negara yang miskin sumber daya alam. Tak heran jika Jepang menjadi salah satu negara investor terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Dengan semakin agresifnya sikap Cina terhadap Jepang, yang dipicu oleh masalah perbatasan, negeri matahari terbit itu pun semakin intensif memberikan bantuan kepada negara-negara di Indo-Pasifik. Jepang juga telah berusaha menggalang dukungan diplomasi untuk mendukung klaimnya melawan Cina. Seperti yang dilakukan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada tanggal 22 Agustus 2007, di depan Parlemen India ketika menyampaikan pidato berjudul "*Confluence of the Two Seas*" (Abe, 2007) yang untuk pertama kalinya mengenalkan istilah Indo-Pasifik (wilayah laut yang terdiri atas Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian Barat dan Tengah, serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudra tersebut) (Medcalf, 2013). Berkaitan dengan keterbatasan pembangunan militer Jepang, sebagai akibat dari perjanjian Perang Dunia ke-2, Jepang sudah pasti menentang keras penurunan kehadiran kekuatan laut

Amerika di Asia Timur.

Fenomena yang tidak kalah penting adalah adanya revisi dari pasal 9 konsitusi Jepang tahun 1947 bentukan Jenderal Mac Arthur. Pada pasal 9 semula melarang Jepang untuk berperang dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. Namun di tahun 2014, AS mendukung reinterprestasi pasal 9 tersebut, yang mana Jepang dapat terlibat di dalam perang untuk membantu negara-negara sekutunya yang terlibat perang. Hal ini membuat Jepang memiliki alasan untuk mengembangkan postur pertahanannya yang lebih bersifat ofensif. Dengan reinterprestasi ini, Jepang menjadi satu kekuatan yang semakin diperhitungkan Cina, karena jika Cina berkonflik dengan negara sekutu Jepang, maka Jepang dapat terlibat dalam perang melawan Cina. Hal tersebut dapat menyebabkan situasi geopolitik di Asia Timur semakin kuat di kubu kelompok rival Cina dan Cina akan lebih membutuhkan mitra yang dapat mengimbangi kekuatan. Indonesia sebagai negara Non-Blok akan menjadi negara yang sangat diminati Cina untuk minimal menjadi negara yang bersahabat dengan Cina, yang tidak ikut memerangi Cina, manakala Cina terlibat konflik dengan kubu AS.

Simpulan

Indonesia adalah bangsa yang tengah mengalami kegalauan identitas, yaitu sebagai bangsa maritim yang berparadigma kedaratan. Oleh karena itu, gagasan membangun Poros Maritim Dunia yang disampaikan Presiden Joko Widodo layak dicatat sebagai tonggak sejarah (*milestone*) atas kebangkitan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Membangun Poros Maritim Dunia adalah sebuah proyek besar yang perlu dukungan semua elemen bangsa. Untuk membuat konsep ini menjadi sebuah kenyataan, maka pemerintah harus mulai berpikir secara strategis dengan bervisi bahari, bukan sekedar kontinental saja. Dengan menempatkan PMD sebagai visi maritim, maka kementerian dan instansi pemerintah lainnya dapat merujuk kebijakannya masing-masing agar selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Turunan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan, strategi pertahanan, strategi angkatan darat, laut dan udara.

Dengan modal *alignment* dengan AS, Cina, dalam ASEAN, dan *middle powers*, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkannya sedemikian rupa untuk keamanan dan kesejahteraan bangsanya. Dalam situasi yang cenderung masih unipolar saat ini, Indonesia akan mendapat manfaat politik jika dapat memiliki kemitraan strategis dengan hegemon di bidang politik dan militer. Hubungan itu dibangun sedemikian rupa sehingga Indonesia

masih memiliki kebebasan dalam menjalin hubungan baik dengan negara besar lain yang bersaing pengaruh dengan AS seperti Cina dan Rusia. Hubungan yang dimaksud adalah seperti apa yang diperankan oleh negara Thailand dan Pakistan. Sebagai negara sekutu AS, Thailand dan Pakistan ternyata telah mampu menjalin kerja sama industri pertahanan yang sangat erat dengan industri pertahanan Cina. Pakistan mengembangkan pesawat tempur generasi 4 bersama Cina (yang dinamakan JF-17 Thunder atau FC-1 Xiaolong). Sementara Thailand telah mampu memproduksi *Multi-Launchers Rocket Systems* (MLRS) lisensi Cina (dengan nama DTI-1 (lisensi teknologi WS-1B) dan DTI-1G (dengan teknologi WS-32) yang terus dikembangkan lebih lanjut). Fenomena di atas menunjukkan bahwa bagi negara aliansi, masih terdapat peluang kebebasan berhubungan diplomatik dengan rival mitra aliansinya. Untuk dapat seperti itu tentunya dituntut kemampuan dan ketrampilan diplomasi yang sangat tinggi.

Kemitraan strategis RI dan Cina sebaiknya lebih ditutamakan pada kerja sama ekonomi dan keamanan dalam menghadapi ancaman nir militer. Cina memiliki sumber daya ekonomi yang relatif besar yang dapat dimanfaatkan untuk sejumlah pembangunan strategis di Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur transportasi maritim. Cina

Kemitraan strategis RI dan AS membuka jalan untuk meningkatkan kekuatan relatif bagi Indonesia yang sekaligus akan menurunkan kekuatan aliansi FPDA. Hal ini akan menyeimbangkan ancaman yang semenjak tahun 1971 lebih menguntungkan pihak Malaysia. Pihak Malaysia pun sejak tahun 2005 hingga saat ini melakukan tindakan provokatif yang jika menggunakan pendapat Benson *et al* (Benson, Bentley, Ray, 2013:1) dikarenakan Malaysia merasa memiliki kekuatan yang lebih besar di dalam aliansi FPDA dibanding Indonesia. Jika kemitraan strategis RI dan AS dibangun mendekati aliansi (kuasi-aliansi), maka diharapkan Malaysia akan merubah perilaku menjadi lebih bersahabat dengan Indonesia.

Pidato Bung Hatta tahun 1948 yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" perlu dipahami lebih seksama. Pemahaman penulis, Bung Hatta justru menganjurkan kita untuk mempertimbangkan *alignment* jika diperlukan demi kepentingan negara. Jika belajar dari Thailand dan Pakistan, aliansi dengan AS tidak menutup kemungkinan untuk membangun kemitraan strategis dengan Cina (Zhou, 2013). Oleh karena itu, kemitraan strategis yang sudah ada dengan AS sudah seharusnya dioptimalkan untuk dapat meningkatkan daya tangkal Indonesia kepada negara potensi ancaman. Kemitraan dengan

AS amatlah penting terutama untuk bidang politik dan keamanan. Namun demikian, kemitraan strategis di bidang ekonomi dengan Cina pun tidak mustahil dibangun secara paralel asalkan tidak berbenturan dengan kepentingan AS. Kemitraan dengan Cina amatlah diperlukan bagi Indonesia terutama dalam mendorong investasi Cina dalam pembangunan prasarana transportasi laut dan prasarana transportasi darat (jalan tol dan jalur kereta api) di luar Jawa. Bukanlah suatu kebetulan jika konsep Jalur Sutra Maritim abad ke-21 memiliki kemiripan dengan Poros Maritim Dunia (Richards, 2014), dan Indonesia harus dapat memanfaatkan momentum intensi Cina untuk mengembangkan prasarana transportasi laut di jalur sutra maritim yang melewati wilayah perairan Indonesia.

Sementara kemitraan strategis dengan AS dalam *Defense Framework Agreement* (DFA) (Hiebert, 2013) harus diupayakan untuk menyerupai kuasi-aliansi, seperti yang terjadi pada kemitraan strategis antara Singapura dan AS. Sudah selayaknya bagi Indonesia yang memiliki kekuatan nasional yang besar memiliki daya tawar yang lebih baik dibandingkan Singapura kepada AS. Perlu suatu kajian yang komprehensif untuk mencapai titik temu dalam mengelola kepentingan AS dan kekuatan besar di Asia Pasifik yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia. Kepentingan AS dan negara besar tersebut umumnya adalah untuk mengamankan : (1) rute pelayaran; (2) akses ke pasar; (3) dan akses ke sumber daya di kawasan Asia-Pasifik, dan lokasi geografis Indonesia tepat berada di tengah-tengah Asia-Pasifik yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan nasional Indonesia.

Sedangkan dalam ASEAN, Indonesia harus berani untuk berperilaku sebagai pemimpin alami ASEAN dengan membantu negara-negara anggota ASEAN yang sedang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan. Solusi menang-menang tidak selalu dapat dicapai. Hal yang harus diutamakan dalam Sengketa Laut Cina Selatan adalah memelihara kredibilitas ASEAN di dalam politik internasional. Indonesia memiliki peran yang strategis dalam berkontribusi dalam mencari solusi damai atas sengketa tersebut. Indonesia harus membuktikan bahwa *ASEAN Way* dapat bermanfaat dalam mencapai resolusi konflik.

Dengan Jepang, Indonesia harus terus meningkatkan hubungan bilateralnya, terutama di bidang ekonomi dan teknologi. Indonesai harus mampu menjadi lokasi favorit bagi relokasi industri Jepang yang membutuhkan tempat dengan upah buruh yang kompetitif, selain dekat dengan pasar ekspornya. Paradiplomasi harus ditingkatkan, agar pemerintah daerah dapat mengisi kekosongan yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah pusat.

Terhadap Australia, Indonesia perlu menyadari bahwa tidak kedua negara saling membutuhkan, baik di bidang ekonomi dan pertahanan. Sudah selayaknya Indonesia mengembangkan hubungan pertahanan kedua negara sehingga bersifat kuasi-aliansi. Jika Indonesia tidak bisa membuat aliansi bilateral, setidaknya Indonesia harus mampu masuk ke dalam alian FPDA yang dipimpin Australia.

Akhirnya bersama India, kedua negara memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Sudah saatnya Indonesia dan India meningkatkan hubungan ekonomi dan pertahanan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. India memiliki kekuatan pertahanan yang besar dan penguasaan teknologi tinggi. Sementara Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Kedua negara seharusnya dapat mencapai titik temu dimana keduanya dapat berkembang bersama menjadi hegemon regional di wilayahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- A. Bader, Jeffrey. (2014). *The US and Cina's Nine-Dash Line: Ending the Ambiguity*. Brookings. Melalui <<http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/02/06-us-Cina-nine-dash-line-bader>>. [6-2-2014].
- Abe, Shinzo. (2007). 'Confluence of the Two Seas'. *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Melalui<<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>>[12 Maret 2015].
- Benson, B.V., P.R. Bentley, J.L. Ray. (2013). 'Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave'. *Journal of Peace Research*. Vol. 50. No.1.
- Buzan, Barry dan Waever, Ole. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clint Richards. 2014. 'Indonesia's South Cina Sea Options'. *South Cina Sea Monitor* Vol. III.
- Daniel S. Hamilton. (2014). 'The American Way of Partnership', *ESPO Working Paper*, No.6, Juni 2014, hal. 22-23.
- Defense Institution Building. *DSCA*. Melalui <<http://dscamilitary.com/programs/institutional-programs>>[1-05-2015]
- Departement of Defense. (2013). *Australian Defense White Paper*. Canberra: DOD.
- Fadillah, Ramadhian. (2015). *Mengenang Poros Jakarta-Peking-Moscow yang buat gemetar AS & Barat*. Merdeka.com. Melalui <<http://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang-poros-jakarta-peking-moscow-yang-buat-gemetar-as-barat.html>> [25-09-2015].
- Fernando, Manusha. (2015). 'Sri Lanka-Cina Tensions Rise Over Suspended Port Project'. *World Socialist Web Site*. Melalui <<https://www.wsws.org/en/articles/2015/03/16/chin-m16.html>> [18-05-2015].
- Gedung Putih AS. (2011). *Remarks By President Obama to the Australian Parliament*. melalui <<https://m.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>>, [1-05-2015]
- Hiebert M. dkk. (2013). *A US-Indonesia Partnership for 2020*. Lanham: Rowman & Littlefield.

- Kemenlu Tiongkok. (2013). *Press Statement for the First Cina-Thailand Strategic Dialogue*. People's Republic of Cina, Ministry of Foreign Affairs. Melalui <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2787_663568/2789_663572/t1067514.shtml> [22-11-2015].
- Inspector General of U.S. Department of Defense. (2012). 'Defense Institution Reform Initiative Program: Elements Need to Be Defined', *Report No. DODIG-2013-019*, 9 November 2012.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.a. *Laut Cina Selatan*. Melalui <<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=31&l=id>>
- Kementrian Pertahanan RI (Defense Media Center). (2015). *Action Plan 2015 Pedoman Kerja sama Peningkatan Sistem dan Manajemen Pertahanan*. Melalui <<http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerja-sama-peningkatan-sistem-dan-manajemen-pertahanan.html>> [1-05-2015].
- M.E. Manyin dkk. (2012). *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*. Washington D.C.: Congressional Research Service
- Medcalf, Rory. (2013). *The Indo-Pacific: What's in a Name? The American Interest*. Melalui <<http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name/>> [12-03-2015]
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Simha Rakesh, Krishnan. (2013). "Flanker Diplomacy: Win-Win for India in Asia. Russia&India Report". Melalui <<http://in.rbth.com/blogs/2013/12/10/flanker-diplomacy-win-win-for-india-in-asia-31495>>.[18-05-2015]
- Zhou, F. (2012). *The Development of Sino-Thai Relations: Status, Impetus, and New Strategic Opportunities*. Dipresentasikan pada First Thai-Chinese Strategic Research Seminar, Bangkok, 24-26 August 2012.